

**SUBORDINASI DAN MARGINALISASI
PEREMPUAN DALAM AKSES PENDIDIKAN
TINGGI DI PEDESAAN: STUDI KOMPARATIF DI
KABUPATEN GOWA**

Firdaus

Universitas Muhammadiyah
Makassar
firdausos@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the forms of subordination and marginalization experienced by women in accessing higher education in rural areas of Gowa Regency. Using a qualitative approach through case studies in six villages, this study explores the subjective experiences of female and male students in the context of gender inequality. The research findings show that strong patriarchal norms, domestic roles attached to women, and low family support are the main obstacles for women to continue their higher education. In addition, economic factors and gender-biased social constructions reinforce the marginalization of women, both structurally and culturally. Although the number of female students is increasing, their strategic role in higher education is still very limited. This study recommends the need for affirmative policies, the provision of gender-friendly educational facilities, and social change campaigns to create fair and equal access to education for women in rural areas.

Keywords: Gender, Subordination, Marginalization, Higher Education, Equality, Rural Women

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk subordinasi dan marginalisasi yang dialami perempuan dalam mengakses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan Kabupaten Gowa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada enam desa, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman subjektif mahasiswa perempuan dan laki-laki dalam konteks ketimpangan gender. Hasil temuan menunjukkan bahwa norma patriarki yang kuat, peran domestik yang dilekatkan pada perempuan, serta rendahnya dukungan keluarga menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, faktor ekonomi dan konstruksi sosial yang bias gender memperkuat marginalisasi perempuan, baik secara struktural maupun kultural. Walaupun terdapat peningkatan jumlah mahasiswa perempuan, peran strategis mereka dalam pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan afirmatif, penyediaan fasilitas pendidikan ramah gender, serta kampanye perubahan sosial untuk menciptakan akses pendidikan yang adil dan setara bagi perempuan di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Gender, Subordinasi, Marginalisasi, Pendidikan Tinggi, Kesetaraan, Perempuan Pedesaan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan dan transformasi sosial masyarakat. Melalui pendidikan, terjadi perubahan cara berpikir dan bertindak yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dan tidak merata, terutama di wilayah pedesaan, di mana ketimpangan gender masih sangat terasa akibat dominasi budaya patriarki (Bria, 2023).

Anak perempuan usia sekolah kerap tidak memperoleh pendidikan yang layak karena adanya anggapan bahwa mereka hanya berperan di ranah domestik. Pandangan ini menyebabkan perempuan lebih sering terjebak dalam pekerjaan informal yang berupah rendah. Rendahnya literasi dan pemahaman orang tua juga turut melanggengkan diskriminasi berbasis gender di dunia pendidikan, yang tercermin melalui stereotip, perundungan, hingga kekerasan terhadap perempuan (Datuk et al., 2020).

Institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan gender. Sayangnya, literatur yang secara komprehensif membahas isu ini masih terbatas (Helaluddin et al., 2022). Padahal, gender sebagai konstruksi sosial tidak semestinya mengakibatkan superioritas satu jenis kelamin atas yang lain. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti memberikan hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta menikmati pendidikan (Efendi, 2018).

Salah satu akar kesenjangan gender adalah stereotip yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior, baik di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan, termasuk melalui visualisasi, bahasa pengajaran, dan sikap pengajar yang bias gender (Achmad, 2019). Di sejumlah desa di Kabupaten Gowa, masih banyak anak perempuan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi karena harus membantu pekerjaan rumah tangga atau bekerja untuk menopang ekonomi keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu membuka akses pendidikan secara merata, menyusun kebijakan berbasis kesetaraan gender, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia perempuan. Penelitian sebelumnya (Alisa, 2019) telah mengidentifikasi

bentuk-bentuk kesenjangan gender seperti stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja ganda.

Meskipun kini lebih banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi dan aktif di berbagai bidang, ketimpangan masih terlihat, termasuk dalam jumlah kepemimpinan perempuan di institusi pendidikan. Di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa kondisi sosial di beberapa desa di Kabupaten Gowa berbeda-beda, namun secara umum masih menghadapi tantangan dalam kualitas pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar, fasilitas yang belum memadai, serta tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi (Alisa, 2022).

Berikut ini disajikan data demografis terkini mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, meliputi tingkat global, nasional (Indonesia), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), hingga lokal (Kabupaten Gowa) dari (Liska et al., 2024) sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi Laki-laki dan Perempuan (Tahun 2023)

No.	Wilayah	Total Populasi	Laki-laki	Perempuan
1	Dunia	8,0 miliar	4,1 miliar	3,9 miliar
2	Indonesia	275 juta	139 juta	136 juta
3	Provinsi Sulawesi Selatan	9 juta	4,5 juta	4,5 juta
4	Kabupaten Gowa	700.000	350.000	350.000

Sumber: Penelitian Liska tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas dijelaskan bahwa data demografis menunjukkan bahwa distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin masih menunjukkan kecenderungan yang relatif seimbang, meskipun terdapat variasi kecil pada tingkat global dan nasional. Secara umum, perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu mencolok, terutama pada skala yang lebih lokal.

Pada tingkat global, jumlah penduduk dunia pada tahun 2023 mencapai sekitar 8 miliar jiwa, yang terdiri atas 4,1 miliar laki-laki dan 3,9 miliar perempuan. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah laki-laki masih sedikit lebih banyak dibanding perempuan di seluruh dunia. Selisih ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor

seperti tingkat kelahiran, kematian, serta pola migrasi global yang kerap lebih melibatkan laki-laki dalam mobilitasnya.

Beralih ke tingkat nasional, penduduk Indonesia tercatat berjumlah 275 juta jiwa, dengan 139 juta laki-laki dan 136 juta perempuan. Pola ini serupa dengan tren global, di mana laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Namun, selisihnya sangat kecil dan menunjukkan bahwa distribusi gender di Indonesia tergolong seimbang. Data ini penting dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan sosial.

Pada tingkat regional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 9 juta jiwa, yang terbagi secara merata antara 4,5 juta laki-laki dan 4,5 juta perempuan. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dominasi satu jenis kelamin terhadap yang lain di wilayah ini, yang dapat menjadi indikasi bahwa dinamika sosial di provinsi ini cenderung stabil dalam hal komposisi gender.

Hal yang sama juga terlihat pada tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Gowa, di mana jumlah penduduk tercatat sebanyak 700.000 jiwa, dengan komposisi yang juga seimbang antara 350.000 laki-laki dan 350.000 perempuan. Keseimbangan ini memberikan gambaran bahwa pada tingkat kabupaten, struktur demografis cenderung lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Gender dan Ketimpangan Sosial

Gender bukan hanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan konstruksi sosial yang melekatkan peran, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka (Faqih, 2010). Dalam konteks ini, kesenjangan gender mencerminkan ketidaksetaraan sistemik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan peran dalam masyarakat (Effendi & Ratnasari, 2018).

2. Diskriminasi Gender dalam Pendidikan

Diskriminasi gender dalam pendidikan terjadi ketika anak perempuan diperlakukan secara tidak adil dalam mengakses pendidikan formal. Hal ini sering dipengaruhi oleh

pandangan patriarkis dalam masyarakat, yang menganggap bahwa pendidikan laki-laki lebih penting dibandingkan Perempuan (Ardiansyah et al., 2024; Yovita et al., 2022). Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi dan lebih banyak diarahkan ke peran domestik.

3. Norma Sosial dan Stereotip Gender

Norma sosial patriarki turut menciptakan stereotip bahwa perempuan lebih cocok berada di ranah domestik dibandingkan publik. Stereotip ini melemahkan motivasi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan memengaruhi pandangan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak perempuan (Achmad, 2019; Sumin et al., 2024). Dalam dunia pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi juga muncul melalui kurikulum, bahasa pengajaran, dan perilaku pengajar yang bias gender.

4. Subordinasi dan Marginalisasi Perempuan

Subordinasi mengacu pada penempatan perempuan dalam posisi kedua setelah laki-laki dalam berbagai aspek sosial, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, marginalisasi terjadi ketika perempuan dijauhkan dari peran-peran strategis atau memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan (Alisa, 2022). Dalam konteks pendidikan tinggi di pedesaan, subordinasi dan marginalisasi ini memperlihatkan diri dalam bentuk rendahnya partisipasi perempuan, akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan, serta beban ganda yang dihadapi.

5. Dampak Ekonomi dan Psikologis dari Diskriminasi

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan berdampak pada rendahnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan berpenghasilan baik. Hal ini menempatkan perempuan dalam sektor informal yang rentan dan bergaji rendah, yang memperkuat siklus kemiskinan (Salsaila, 2024; Mukramin, 2023). Selain itu, diskriminasi juga menimbulkan dampak psikologis seperti menurunnya kepercayaan diri, stres, hingga gangguan mental (Prawira & Sulastri, 2024).

6. Upaya Mengatasi Ketimpangan Gender

Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif dan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan gender. Kampanye kesadaran publik, program beasiswa khusus perempuan, serta dukungan sosial dan finansial adalah langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan (Afifah et al., 2024; Arianto, 2023; Cakrawikara, 2017).

Tinjauan Teoritis

Pada konteks masyarakat pedesaan di Kabupaten Gowa, konstruksi sosial gender tercermin dalam pembagian peran yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik. Hal ini menjadikan pendidikan tinggi dipersepsikan sebagai hak yang lebih relevan bagi laki-laki, sedangkan perempuan diarahkan untuk menguasai keterampilan rumah tangga. Peran sosial ini tidak muncul secara alamiah, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipelajari dan diwariskan secara turun-temurun.

Sistem patriarki (Isram, 2020; Bria, 2023) di masyarakat Gowa mengukuhkan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan pendidikan. Hal ini tampak dari kebijakan keluarga yang lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dan kurangnya dukungan moral maupun material terhadap pendidikan anak perempuan. Perempuan yang aktif secara akademik bahkan sering kali menerima stigma negatif, dipandang "tidak sesuai kodrat," atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Ketidaksetaraan ini diperkuat melalui dua bentuk nyata subordinasi dan marginalisasi (Faqih, 2010). Subordinasi muncul dalam bentuk keputusan-keputusan penting tentang pendidikan yang diambil oleh ayah atau saudara laki-laki tanpa melibatkan perempuan. Sementara marginalisasi terlihat dari rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya pendidikan seperti beasiswa, transportasi, dan ruang belajar aman. Stigma terhadap perempuan yang pulang malam karena kuliah atau mengikuti kegiatan akademik juga memperkuat proses peminggiran ini.

Selain itu, stereotip gender (Achmad, 2019) seperti "perempuan tidak cocok jadi pemimpin" atau "perempuan cukup sampai dapur" menyebabkan rendahnya motivasi dan kepercayaan diri anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Stereotip ini tidak hanya diinternalisasi oleh siswa perempuan, tetapi juga diyakini oleh orang tua dan pendidik,

sehingga memengaruhi pilihan pendidikan dan karier anak. Ketimpangan ini juga bersifat struktural, ditandai oleh sistem sosial dan ekonomi yang tidak menyediakan fasilitas yang adil bagi perempuan. Faktor-faktor seperti terbatasnya infrastruktur pendidikan, beban kerja domestik ganda, serta rendahnya literasi gender orang tua berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi perempuan di perguruan tinggi. Hal ini diperkuat oleh data BPS yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di pedesaan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Lebih jauh, interseksionalitas Crenshaw, K. (1989) dalam implikasi temuan menjadi lensa penting untuk melihat bahwa hambatan perempuan tidak hanya berasal dari gender, tetapi juga diperparah oleh kelas sosial dan lokasi geografis. Anak perempuan dari keluarga miskin di desa terpencil mengalami kerentanan ganda: sebagai perempuan dan sebagai bagian dari kelompok ekonomi terpinggirkan. Mereka menghadapi lebih banyak kendala dalam mengakses pendidikan, baik dari sisi biaya, jarak, maupun dukungan sosial. Dalam kerangka keadilan gender dalam Pendidikan (Effendi, 2018), idealnya semua individu memiliki hak dan peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa akses, partisipasi, dan hasil pendidikan di Gowa masih sangat bias gender. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan afirmatif seperti penyediaan beasiswa khusus perempuan, fasilitas kampus yang ramah gender, serta pengarusutamaan gender dalam kurikulum dan tata kelola lembaga pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam kesenjangan gender dalam akses pendidikan tinggi di enam desa di Kabupaten Gowa: Tanete, Paku, Tompobalang, Moncobalang, Barembeng, dan Sapaya. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan setempat yang dipilih secara purposif, dengan analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan wawancara dan sumber sekunder (Incing et al., 2013; Creswell, 2014). Adapun kriteria informan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Nama Desa	Informan Laki-laki	Informan Perempuan	Total Informan	Kriteria Informan
1	Tanete	3	3	6	Mahasiswa aktif, warga desa Tanete, mengalami atau mengetahui hambatan akses pendidikan tinggi.
2	Paku	3	3	6	Mahasiswa aktif, warga desa Paku, dipilih karena relevan dengan isu kesenjangan gender dalam pendidikan.
3	Tompobalang	3	3	6	Mahasiswa laki-laki dan perempuan, berdomisili di Tompobalang, mampu memberikan narasi pengalaman pribadi.
4	Moncobalang	3	3	6	Warga asli Moncobalang, status mahasiswa, memiliki pengalaman langsung dengan akses pendidikan tinggi.
5	Barembeng	3	3	6	Mahasiswa lokal, memahami kondisi sosial desa Barembeng terkait pendidikan dan gender.
6	Sapaya	3	3	6	Warga desa Sapaya, mahasiswa aktif, terlibat dalam dinamika sosial yang berkaitan dengan hambatan pendidikan tinggi.
Total		18	18	36	

Metode studi kasus ini memungkinkan eksplorasi pengalaman subjektif dan faktor lokal yang memengaruhi akses pendidikan. Analisis data dilakukan dengan tiga teknik utama: analisis tematik untuk menemukan pola umum (Braun & Clarke, 2006), analisis naratif untuk memahami cerita personal, dan analisis konten untuk mengidentifikasi isu dan kata kunci yang relevan. Pendekatan ini memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam yang dapat mendukung kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap isu gender (Ridlo, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Subornisasi Gender dalam Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik subordinasi terhadap anak perempuan dalam akses pendidikan masih terjadi di berbagai desa lokasi penelitian. Subordinasi ini tercermin dari sikap sebagian besar orang tua yang kurang memberikan perhatian atau dukungan terhadap keinginan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perempuan sering kali diposisikan sebagai beban ekonomi keluarga, sehingga pendidikan mereka dianggap tidak terlalu penting. Akibatnya, banyak anak

perempuan menghadapi hambatan dalam menyelesaikan pendidikan menengah maupun memasuki perguruan tinggi.

Informasi dari beberapa informan mengindikasikan bahwa masih kuatnya nilai-nilai patriarki di lingkungan masyarakat menjadi faktor utama terjadinya subordinasi ini. Perempuan dipandang hanya layak mengurus urusan domestik, sementara keputusan-keputusan penting terkait pendidikan lebih sering diberikan kepada laki-laki. Pendapat perempuan dianggap kurang rasional dan tidak dijadikan prioritas, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak mereka dalam mengakses pendidikan secara setara.

Kondisi ini berdampak signifikan terhadap masa depan anak perempuan. Ketika hak mereka dalam mengakses pendidikan dibatasi, potensi diri yang dimiliki tidak dapat berkembang secara maksimal. Selain itu, masa depan mereka menjadi tidak pasti karena kurangnya peluang untuk berdaya secara ekonomi dan sosial (Bria, 2023). Dalam konteks pendidikan, perempuan juga mengalami kesulitan untuk menempati posisi strategis karena persepsi bahwa laki-laki lebih pantas menduduki jabatan kepemimpinan di lembaga pendidikan (Kurniawati & Samhati, 2021).

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Isram (2020), yang menyatakan bahwa meskipun wacana kesetaraan gender dalam pendidikan telah lama digaungkan, seperti oleh R.A. Kartini, praktik-praktik patriarkis masih sangat dominan di masyarakat. Perempuan sering kali terpinggirkan, tidak hanya dalam ruang publik tetapi juga dalam pengambilan keputusan pendidikan di dalam keluarga. Dominasi laki-laki dalam hal akses, kesempatan, dan wewenang menyebabkan perempuan hanya berada dalam posisi mengikuti, bukan menentukan arah hidupnya secara bebas dan mandiri.

2. Marginalisasi Perempuan di Dunia Pendidikan.

Penelitian ini menemukan bahwa marginalisasi terhadap perempuan dalam pendidikan masih terjadi dalam bentuk sikap dan pandangan sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi terpinggirkan. Marginalisasi dipahami sebagai proses meminggirkan individu atau kelompok karena perbedaan tertentu, dalam hal ini berdasarkan gender. Dalam konteks pendidikan, hal ini tercermin dari prasangka negatif masyarakat terhadap perempuan yang pulang larut malam dari sekolah atau kampus, atau ketika mereka mengikuti kegiatan belajar kelompok di luar rumah pada malam hari. Perempuan yang berinteraksi dengan laki-laki di

lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi juga kerap menjadi sasaran penilaian buruk. Stigma-stigma sosial semacam ini menjadi penghambat tidak langsung bagi partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan pendidikan (Bria, 2023).

Hasil wawancara dengan S, seorang informan dari Desa Paku, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi turut memperkuat praktik marginalisasi ini. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, karena diyakini memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama di masa depan. Hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memperoleh dukungan yang sama dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

Pandangan serupa diungkapkan oleh N dari Desa Moncobalang. Ia menyatakan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan juga disebabkan oleh pola pikir tradisional yang masih mengakar kuat di masyarakat. Menikahkan anak perempuan di usia muda kerap dianggap lebih membanggakan dibanding membiayai mereka hingga ke perguruan tinggi. Hal ini dilandasi asumsi bahwa perempuan pada akhirnya hanya akan kembali ke ranah domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga investasi pendidikan dianggap tidak bernilai.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa marginalisasi perempuan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersumber dari konstruksi sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Praktik ini secara tidak langsung menghambat akses dan keberlanjutan Pendidikan perempuan, serta memperkuat ketimpangan gender di sektor pendidikan.

3. Pandangan Masyarakat terhadap Pendidikan Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa sebagian besar orang tua di wilayah pedesaan masih memiliki pandangan tradisional yang menempatkan perempuan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tugas utamanya dianggap terbatas pada urusan domestik seperti memasak, mengasuh anak, dan mengelola rumah tangga. Persepsi ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, karena dianggap tidak relevan dengan peran masa depan mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga. Akibatnya, anak perempuan sejak dini diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut, yang secara tidak langsung menghambat pengembangan potensi intelektual, sosial, dan profesional mereka (Bria, 2023; Dian, 2023).

Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari *subordinasi gender*, yaitu penempatan perempuan pada posisi sosial yang lebih rendah daripada laki-laki dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal Pendidikan (Alisa, 2022). Pandangan ini tidak hanya melemahkan posisi perempuan dalam keluarga, tetapi juga mempersempit akses mereka terhadap kesempatan ekonomi dan partisipasi publik. Dalam masyarakat patriarkal, seperti disebutkan oleh Bria (2023), perempuan yang ideal adalah mereka yang mengabdikan diri sepenuhnya dalam ranah domestik dan tidak melebihi laki-laki dalam hal apapun, baik pendidikan, karier, maupun kepemimpinan.

Norma-norma sosial semacam ini mencerminkan konstruksi sosial yang kaku tentang peran gender. Padahal, seperti dijelaskan oleh (Faqih, 2010), konsep gender bukan semata-mata perbedaan biologis, melainkan merupakan konstruksi sosial yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan ekspektasi berdasarkan jenis kelamin. Ketika perempuan tidak diberikan hak yang sama dalam pendidikan, maka mereka juga akan dibatasi dalam mengakses ruang-ruang publik dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya memperkuat siklus ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (Effendi & Ratnasari, 2018). Dalam konteks ini, kesetaraan gender dalam pendidikan berarti memberikan akses, retensi, dan kesempatan pembelajaran yang setara kepada semua individu tanpa diskriminasi (Effendi, 2018).

3. Budaya Patriarki dan Keamanan Perempuan

Pada praktiknya di lapangan, kesetaraan gender merupakan gagasan yang sangat mungkin dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu dan memanfaatkannya. Sebagai buktinya, meskipun telah banyak terjadi perubahan dalam jumlah mahasiswa perempuan di tingkat kampus namun masih banyak ditemukan bentuk-bentuk patriarki atau hegemoni di lingkungan kampus (Ilagan, 2019).

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.

Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, kaum intelektual, dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk menjadi sebuah budaya. Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama, dan instrumen-instrumen pendidikan sejak dari pendidikan keluarga sampai pada pendidikan formal.

4. Faktor Ekonomi sebagai Hambatan

Marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan sudah terjadi di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi diperkuat adat istiadat dan tafsir keagamaan (Fakih, 1996). Misalnya saja, banyak diantara suku-suku di Indonesia dimana kaum perempunya tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan warisan. Sebagian tafsiran agama memberikan hak setengah terhadap kaum perempuan (Fakih, 1996).

Pada umumnya anak perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk mengeyam pendidikan adalah mereka yang berasal dari keluarga yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas, sehingga bagi status ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan pendidikan untuk anak perempuan tidak diprioritaskan akibat status ekonomi tersebut. Hal ini tampak pada masyarakat simatorkis, dimana orangtua akan berupaya keras untuk membiayai anak laki-lakinya.

Adanya faktor teologis tentang kepemimpinan laki-laki dalam Islam, mengakibatkan mereka harus diberi bekal sebaik-baiknya. Dapat dikatakan orang tua tidak berusaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi anak perempuan atau memperlakukan anak perempuan sebagaimana perlakuan pada anak laki-lakinya. Pandangan gender seperti ini menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa Perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, yang berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 1996).

6. Dampak Kesetaraan Gender di Pendidikan Tinggi

Kesetaraan gender membawa dampak positif yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dari jumlah mahasiswa perempuan, hampir di seluruh universitas memiliki jumlah mahasiswa perempuan yang cukup banyak. Selain kabar gembira di atas, kesetaraan gender masih banyak mengalami kendala dan permasalahan. Pengabaian gender dan kontribusi perempuan di perguruan tinggi masih menjadi fenomena luas selama 50 tahun terakhir. Bahkan, isu tersebut merupakan masalah nyata yang juga telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Seperti benda dengan dua mata sisi, kesetaraan gender juga masih menyimpan berbagai problematika yang harus ditangani segera (Hayati et al., 2023).

Kesenjangan gender pada perempuan dalam mendapatkan Pendidikan merupakan hal yang sering terjadi di Masyarakat Desa. Bentuk-bentuk kesenjangan tersebut yang dapat dilihat dalam Pendidikan seperti hak Perempuan yang dibatasi untuk mengakses Pendidikan yang mana banyak Perempuan hanya mengakses Pendidikan sampai Tingkat sekolah menengah, Pendidikan anak Perempuan yang kurang diperhatikan orang tua karena dianggap beban bagi keluarga, Pendidikan anak Perempuan selalu dinomorduakan dan Pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan, Pendidikan anak Perempuan kurang difasilitasi sehingga dapat menyebabkan Pendidikan anak Perempuan menjadi terhambat dan terkendala untuk mencapai tujuan.

Di beberapa negara, kebijakan kuota perempuan telah diberlakukan dan memberikan efek positif terhadap kesetaraan gender di lingkungan kampus, salah satunya di negara Austria. Setelah diberlakukan kebijakan ini, jumlah perempuan yang berpartisipasi pada pemilihan rektor, wakil rektor, dekan, dan jabatan lembaga kampus meningkat cukup signifikan. Namun lain halnya dengan Korea selatan, kebijakan ini dianggap kurang berhasil karena ketimpangan gender masih saja terjadi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya kebijakan lain yang menopang kebijakan kuota perempuan agar praktik kesetaraan gender dapat mencapai angka statistik yang ideal (Gurjar, 2017).

Tabel 3. Isu, Tantangan, dan Strategi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Tinggi

Aspek	Penjelasan
Dampak Positif	Jumlah mahasiswa perempuan meningkat di berbagai universitas. Ini

Kesetaraan Gender	menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di perguruan tinggi.
Kendala yang Masih Dihadapi	Kontribusi perempuan di perguruan tinggi masih sering diabaikan. Isu kesetaraan gender telah berlangsung lebih dari 50 tahun namun masih belum tuntas.
Bentuk Kesenjangan Gender di Masyarakat Desa	- Pendidikan anak perempuan dibatasi hanya sampai tingkat menengah- Anak perempuan dianggap beban ekonomi keluarga- Pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan- Fasilitas pendidikan untuk anak perempuan masih rendah.
Contoh Kebijakan Negara tentang Kuota Gender	- Austria: Kebijakan kuota perempuan berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan jabatan kampus (rektor, wakil rektor, dekan)- Korea Selatan: Kebijakan serupa kurang berhasil karena ketimpangan gender tetap terjadi.
Strategi dan Pendekatan Implementatif	- Model referensi untuk promosi kesetaraan gender di kampus (Yang, 2016)- Pendekatan keberagaman oleh Klein- Pengembangan karakter dan kepribadian mahasiswa serta pegawai untuk menghapus norma gender tradisional.

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Ada banyak berbagai strategi yang digunakan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi dalam menerapkan kesetaraan gender. Selain menerapkan kebijakan kuota perempuan dalam berpartisipasi pada jabatan/pekerjaan di universitas, ada banyak strategi dan metode yang coba ditawarkan oleh para peneliti dan ahli. Salah satunya adalah model referensi dalam mempromosikan kesetaraan gender di tingkat kampus oleh Yang pada tahun 2016 (Esteves, 2018).

Di samping itu, Klein juga menawarkan pendekatan keberagaman dalam kaitannya dengan program kesetaraan gender di universitas. Banyaknya pendekatan dan program tersebut mengindikasikan bahwa isu kesetaraan gender tidak mudah diimplementasikan. Strategi pengarusutamaan gender yang telah diterapkan selama ini memang berpotensi menantang norma-norma yang ada di masyarakat dan membutuhkan perubahan secepatnya. Hal lainnya yang dapat dilakukan dalam mempromosikan kesetaraan gender adalah dengan mengembangkan kepribadian dan karakter mahasiswa dan pegawai kampus. Kedua aspek tersebut diyakini dapat menghapus peran dan norma gender tradisional yang terlanjur melekat di Masyarakat (Hayward, Fred M., 2019).

7. Pandangan Masyarakat dan Realitas Statistik terhadap Pendidikan Perempuan di Pedesaan

Pandangan masyarakat pedesaan serta data kuantitatif terkait kesenjangan gender dalam akses pendidikan tinggi di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari beberapa desa dan kelurahan, ditemukan bahwa konstruksi sosial mengenai peran perempuan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan stereotip gender yang kuat.

Informan H dari Desa Barembeng menuturkan bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan sering kali dianggap tidak penting karena peran utama perempuan diyakini adalah menikah dan mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, laki-laki lebih mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan, sebab mereka diposisikan sebagai calon pencari nafkah keluarga. Pandangan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi rumah tangga turut memperkuat subordinasi perempuan dalam bidang pendidikan.

Kemudian informan A dari Kelurahan Sapaya menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang lemah membuat masyarakat memandang bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi, karena akhirnya akan kembali ke peran domestik. Hal ini menunjukkan adanya rasionalisasi diskriminatif yang berbasis pada efisiensi ekonomi rumah tangga, yang justru memperkuat ketimpangan gender.

Hal senada juga diungkapkan oleh S dari Desa Paku, yang menyoroti kecenderungan keluarga untuk memprioritaskan pendidikan anak laki-laki karena dianggap lebih potensial dalam menopang ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, anak perempuan cenderung terabaikan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Sementara itu, N dari Desa Moncobalang mengungkapkan bahwa kesenjangan gender juga disebabkan oleh pola pikir konservatif masyarakat, di mana pernikahan dini anak perempuan lebih dibanggakan daripada menyekolahkan mereka ke perguruan tinggi. Pandangan ini tidak hanya memperkuat subordinasi, tetapi juga menghambat pemberdayaan perempuan dalam jangka panjang.

Temuan kualitatif ini diperkuat oleh data dari BPS (2022), yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah laki-laki, yaitu hanya 8,87 tahun dibandingkan 9,28 tahun pada laki-laki. Di pedesaan, angka ini bahkan lebih rendah lagi,

dengan perempuan hanya mengenyam pendidikan selama 7,36 tahun (setara dengan kelas 7/SMP). Selain itu, persentase perempuan tanpa ijazah pada jenjang pendidikan menengah dan atas lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Data ini secara kuantitatif membuktikan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan bukan hanya masalah persepsi, tetapi merupakan realitas struktural yang membutuhkan intervensi nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, budaya patriarki, norma konservatif, serta kurangnya dukungan struktural menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di pedesaan. Penjelasan ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi kebijakan afirmatif dan program kesetaraan pendidikan yang inklusif.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan gender dalam akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan Kabupaten Gowa masih sangat nyata dan berakar kuat pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Subordinasi perempuan tercermin dalam minimnya dukungan keluarga terhadap pendidikan perempuan, dominasi nilai-nilai patriarki, serta pelabelan sosial yang merendahkan partisipasi perempuan dalam dunia akademik. Sementara itu, marginalisasi muncul dalam bentuk stigma sosial, distribusi sumber daya yang timpang, serta keterbatasan fasilitas pendidikan yang ramah gender.

Pandangan masyarakat yang masih mengutamakan laki-laki sebagai pencari nafkah dan menganggap perempuan lebih cocok di ranah domestik, turut memperkuat ketimpangan akses pendidikan. Faktor ekonomi juga menjadi kendala utama, di mana keluarga berpenghasilan rendah lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki. Hal ini diperparah dengan pernikahan dini serta rendahnya literasi gender di kalangan orang tua.

Meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan di perguruan tinggi, namun peran strategis mereka masih terbatas dan belum mendapatkan ruang yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif, program afirmatif, serta pengarusutamaan gender di institusi pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi harus bekerja sama dalam membuka akses yang adil, menyediakan fasilitas ramah gender, serta menghapus stereotip dan diskriminasi yang membatasi potensi perempuan.

Daftar Pustaka

- Achmad, S. (2019). Membangun Pendidikan Berwawasan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 70–91. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2843>
- Afifah, R., Nuraini, T., & Suryani, D. (2024). Strategi kebijakan afirmatif untuk peningkatan akses pendidikan perempuan di pedesaan. *Jurnal Kebijakan dan Pemberdayaan Perempuan*, 8(1), 44–59.
- Alisa. (2022). *“Fenomenologi Kesenjangan Gender dalam Mengenyam Pendidikan: Studi Tentang Kesenjangan Gender di Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.”*
- Ardiansyah, D., Putri, M. A., & Syamsu, R. (2024). Diskriminasi gender dalam pendidikan: Perspektif budaya patriarki. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 9(1), 25–40.
- Arianto, T. (2023). Peran kebijakan afirmatif dalam mengatasi ketimpangan gender di sektor pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kesetaraan Gender*, 5(3), 67–80.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Bria, F. Y. (2023). Faktor Penyebab Kesenjangan Gender Pada Perempuan Dalam Mendapatkan Pendidikan Di Kabupaten Malaka. *Prosiding Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 1(November), 19–29.
- Bria, Y. (2023). *Marginalisasi Gender dan Ketimpangan Pendidikan di Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Lentera Sosial.
- Cakrawikara, H. (2017). *Pendidikan inklusif berbasis gender: Konsep dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Datuk, A., Bora, E., & Muhammadiyah Kupang, U. (2020). Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(2).
- Effendi, T., & Ratnasari, N. (2018). Ketimpangan gender dalam masyarakat modern: Kajian multidimensi. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 4(2), 88–101.
- Effendi, S. (2018). Kesenjangan Gender Dan Kesetaraan Ketenagakerjaan: Sebuah Tinjauan. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 1(3), 10–18.

<https://doi.org/10.54783/japp.v1i3.405>

- Esteves, M. (2018). Gender Equality in Education: A Challenge for Policy Makers', *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4.2.
- Faqih, M. (2010). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gurjar, M. S. (2017). *The Comparative Analysis Over Women Education via Tagore and Gandhi'*, *Educational Quest*, 8.3.
- Hayati, M., Wicaksono, A. D., & Dinanti, D. (2023). Kajian Kesenjangan Antar Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang. *Planning for Urban Region and Environment*, 12(3), 179–190.
- Hayward, Fred M., and R. K. (2019). *The Struggle for Higher Education Gender Equity Policy in Afghanistan: Obstacles, Challenges and Achievements'*, *Education Policy Analysis Archives*, 27.139.
- Helaluddin, Alamsyah, & Purwati, D. (2022). Kesetaraan gender di Perguruan Tinggi: Masihkah sebatas konsep? *Studi Gender Dan Anak*, 9(1), 1–16.
- Ilagan, L. s. (2019). *'Gender Mainstreaming in a Higher Education Institution (Hei)'*, *European Journal of Social Sciences Studies*, 4.4.
- Incing, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013). Kesenjangan Gender (Perempuan) Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 38–40.
- Incing, M., Ramli, R., & Lestari, A. (2013). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Makassar: Universitas Negeri Makassar Press.
- Isram. (2020). *Belenggu budaya patriarki terhadap kesetaraan gender di indonesia*.
- J. Mayer. (2017). *'Towards Equality for Women and Men from One Race: Sophie Rogge-Borner's Racial-Feminist'*, *Philosophy of Education Gender and Education*, 29.2.
- Kamarul Md Shah, Farah Mukhtar, Hasnah Abdullah, Maroriza Abdul Malek, & Zairiniah Mohd Shukur. (2017). Kemahiran Generik dan Pencapaian Akademik dalam Kalangan Guru Pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia. *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 42(1), 69–75.
- Kurniawati, E., & Samhati, S. (2021). Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/jwcs.v1i2.10145>
- Liska, F., Tiara, V., & Barella, Y. (2024). Menyelami Tren Populasi Dunia: Fakta, Angka, dan

Implikasinya. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3), 1–7. Ridlo, U. (2023). *metode penelitian study kasus: teori dan praktik*.

Prawira, A., & Sulastri, E. (2024). Dampak psikologis diskriminasi pendidikan terhadap perempuan: Telaah fenomenologis. *Jurnal Psikologi Perempuan dan Anak*, 11(1), 19–33.

Ridlo, A. (2023). Pendekatan kualitatif dalam studi gender dan pendidikan tinggi: Menemukan makna di balik data. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 8(2), 101–117.

Salsaila, A. (2024). Ketimpangan ekonomi akibat bias gender dalam sistem pendidikan. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 12(1), 55–70.

Sumin, R., Handayani, T., & Mulyani, R. (2024). Stereotip gender dalam lingkungan sekolah dasar: Tinjauan kualitatif. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 14(2), 78–93.

Yovita, N., Wahyuni, S., & Hadi, R. (2022). Hambatan pendidikan perempuan dalam masyarakat patriarki: Studi komparatif di Jawa dan Sumatera. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 7(1), 33–48.